KECAMATAN KRAYAN
KABUPATEN NUNUKAN

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026





J L . ANGKASA 125 LONG KATUNG, KECAMATAN KRAYAN
KABUPATEN NUNUKAN , PROVINSI KALIMANTAN UTARA (77456)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Krayan Tahun 2026 ini dapat tersusun dengan baik. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Krayan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan dengan mengedepankan rasionalitas terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, Renja Perangkat Daerah Kecamatan Krayan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Krayan dalam 1 (satu) tahun anggaran ke depan. Renja Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana melaksanakan progam dan kegiatan pelayanan Kecamatan Krayan sesuai tupoksinya.

Program Kegiatan pada Renja 2026 ini mengacu pada program kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Krayan sehingga disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun - tahun sebelumnya juga merumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2025-2029 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Kami menyadari bahwa banyak kekurangan dalam menyusun laporan ini untuk itu kami mohon saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan Renja ini. Akhirnya kami berharap semoga Renja Perangkat Daerah Kecamatan Krayan Tahun 2026 dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam perencanaan pada tahun yang akan datang.

Long Katung, 4 Maret 2026
CAMAT KRAYAN

RONNY FIRDAUS, SE.,M.Si
NIP. 197312 312000112 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

Bab I Pendahuluan 3

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 19

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat 27

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 28

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 28

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Krayan 28

3.3. Program dan Kegiatan 28

Bab IV Penutup 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas*, *transparansi, efektivitas* dan *efesiensi.*

Dengan prinsip tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas:

a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Camat juga menerima pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Nunukan, yang meliputi aspek :

a. Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati, yaitu:
    1. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan

2. Untuk melaksanakan tugas perbantuan.

b. Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementrian/lembaga pemerintah non kementrian terkait kepada Bupati.

c. Camat di Kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan di Kecamatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
2. Perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari :
   - Urusan pemerintahan unsur kewilayahan;
   - Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
   - Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   - Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
   - Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   - Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
   - Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
   - Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
   - Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
3. Pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemberdayaan masyarakat;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi ketentraman dan ketertiban umum;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
8. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
9. Perumusan pemberian rekomendasi teknis dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
10. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

Mengingat semakin kompleksnya tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan

perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrembang baik di tingkat Kelurahan / Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Dinas Daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas telah disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik *(good governance)*. Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis OPD Kecamatan Krayan yang diorientasikan untuk mewujudkan visi Kabupaten Nunukan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 yaitu :

“KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA , ADIL DAN MANDIRI”

Selanjutnya visi tersebut di jabarkan dalam Misi Kabupaten Nunukan yang dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat, dan berkarakter ;
2. Peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi Masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal ;
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat, dan tuntas ;
4. Percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata ; dan
5. Menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan Krayan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjelaskan mengenai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan

perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta mengakomodasikan hasil Musrenbang dan Forum Organisasi Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Seluruh Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Krayan tahun 2026 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas, yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Krayan guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh pemerintah Kabupaten Nunukan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya rencana kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Krayan tahun 2026 adalah:

1. Sebagai bentuk input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Nunukan khususnya Kecamatan Krayan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Krayan;
4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penyusunan

II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KRAYAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Krayan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Krayan
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Krayan
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KRAYAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Krayan
3.3. Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KRAYAN

V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KRAYAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Krayan

Pelaksanaan program dan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antara lain :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
  - Koordinasi Penyelenggarann Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
  - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
  - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
  - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
  - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Untuk lebih jelasnya tentang rekapan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra tahun sebelumnya dari Kecamatan Krayan dapat dilihat sebagaimana tabel T-C. 29 berikut:

Tabel T-C . 29
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN TAHUN LALU

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun (n - 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 (7/6*100)	9	10 (5 + 7 + 9)	11 (10 /4)
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kelancaran pelaksanaan pelayanan umum dengan administrasi yang tertib ditunjang dengan sarana prasarana yang lengkap dan sumber daya yang berkualitas**			**3.929.195.616,00**	**3.771.040.473,76**	**95,97 %**			
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas**			**12.103.450,00**	**7.955.650,00**	**65,73 %**			

7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.000.800,00	2.997.000,00	99,87 %			
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.102.650,00	4.958.650,00	54.47 %			
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan**			**2.997.704.880,00**	**2.893.328.316,00**	**96.52 %**			
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2.997.704.880,00	2.893.328.316,00	96.52 %			
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**			**351.582.158,00**	**325.058.682,00**	**92.46 %**			
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			49.748.750,00	49.717.230,00	99.94 %			

7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			36.362.798,00	36.184.446,00	99.51 %			
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4.916.230,00	4.827.390,00	98.19 %			
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			11.952.380,00	11.927.616,00	99.79 %			
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			248.602.000,00	222.402.000,00	89.46 %			
7	01	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pengadaan BMD**			**87.500.000,00**	**87.499.383,40**	100,00 %			
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			28.000.000,00	27.999.750,00	100.00 %			

7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			7.000.000,00	6.999.660,00	100.00 %			
7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			52.500.000,00	52.499.973,40	100.00 %			
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang**			**375.889.328,00**	**354.390.960,00**	**94.28 %**			
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			9.600.000,00	6.000.000,00	62.50 %			
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			366.289.328,00	348.390.960,00	95.11 %			

7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD**			**104.415.800,00**	**102.807.482,36**	**98.79**	**%**			
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			28.540.800,00	27.850.150,00	97.58	%			
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			75.875.000,00	74.957.332,36	98.79	%			
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien**			**58.831.842,00**	**57.445.611,00**	**97.64**	**%**			
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**31.205.122,00**	**31.126.948,00**	**99.75**	**%**			

7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			24.958.500,00	24.912.800,00	99.82 %			
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			6.246.622,00	6.214.148,00	99.48 %			
7	**01**	**02**	**2**	**04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah urusan yang dilimpahkan**			**27.626.720,00**	**26.318.663,00**	**95.27 %**			
7	01	02	2	04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perizinan Non Usaha pada Urusan Pemerintahan			17.979.920,00	17.863.403,00	99.35 %			
7	01	02	2	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			9.646.800,00	8.455.260,00	87.65 %			
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat keberdayaan masyarakat**			**4.327.400,00**	**4.095.960,00**	**94.65 %**			
7	**01**	**03**	**2**	**02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah desa yang diberdayakan**			**4.327.400,00**	**4.095.960,00**	**94.65 %**			

7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			4.327.400,00	4.095.960,00	94.65 %			
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan**			**25.321.000,00**	**24.972.310,00**	**98.62 %**			
7	**01**	**04**	**2**	**02**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan**			**25.321.000,00**	**24.972.310,00**	**98.62 %**			
7	01	04	2	02	01	Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			19.367.800,00	19.023.730,00	98.22 %			
7	01	04	2	02	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			5.953.200,00	5.948.580,00	99.92 %			
7	***01***	***05***				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**			**109.780.100,00**	**109.682.660,00**	**99.91 %**			

7	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**			**109.780.100,00**	**109.682.660,00**	**99,91 %**			
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionaldalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaa n Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			103.468.800,00	103.378.400,00	99.91 %			
7	01	05	2	02	08	Pelaksanaan Tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas forum kordinasi Pimpinan di Kecamatan			6.311.300,00	6.304.260,00	99.89 %			
7	***01***	***06***				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional**			**34.536.750,00**	**28.239.520,00**	**81.77 %**			

7	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang dibina dan diawasi**			**34.536.750,00**	**28.239.520,00**	**81.77 %**			
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa"			8.840.000,00	3.060.000,00	34.62 %			
7	01	06	2	01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan PerangkatDesa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			5.470.300,00	5.459.520,00	99.80 %			
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Verifikasi Desa			**20.226.450,00**	**19.720.000,00**	**97.50 %**			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Krayan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Krayan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- Meningkatnya persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah
- Meningkatnya persentase penyelenggaraan pugas pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien
- Meningkatnya tingkat keberdayaan Masyarakat
- Meningkatnya persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman dan keindahan
- Meningkatnya persentase pembaga pemasyarakatan pingkat pecamatan yang memiliki kinerja yang professional
- Meningkatnya persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Krayan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi. Selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi yang dapat menjadi faktor kunci keberhasilan tercapainya indikator kinerja.

Untuk lebih jelasnya terkait analisis kinerja Kecamatan Krayan dapat dilihat dalam tabel T-C.30 sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,25	87,50	87,75	88,88	87,88	81,96	88,88	-	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Krayan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap berdasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nunukan;

2) Penyelenggaraan pembangunan terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;
4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur yang ada di Kecamatan Krayan yang bermuara pada terlaksananya pelayanan yang efektif dan efisien. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
5) Peningkatan sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur di tingkat Kecamatan. Maka diharapkan peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan prima pada masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

a. Rancangan kerangka ekonomi daerah
b. Program prioritas pembangunan daerah, dan
c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Krayan berdasarkan RKPD Kabupaten Nunukan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Rencana Kerja OPD Kabupaten Nunukan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Krayan.

Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel T-C. 31 berikut :

TABEL T - C .31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN KRAYAN

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	*4*	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Nunukan**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**3.311.298.572,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Krayan**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**3.311.298.572,00**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas**	**100 Persen**	**17.022.800,00**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas**	**100 Persen**	**17.022.800,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Krayan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.000.800,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Krayan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.000.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Krayan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	14.022.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Krayan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	14.022.000,00	

2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan**	**23 orang/ bulan**	**2.659.163.634,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan**	**23 orang/ bulan**	**2.659.163.634,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Krayan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/ bulan	2.659.163.634,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Krayan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/ bulan	2.659.163.634,00	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	**100 Persen**	**255.795.488,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	**100 Persen**	**255.795.488,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Krayan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Paket	33.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Krayan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	33.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Krayan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.092.448,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Krayan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.092.448,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Krayan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.986.950,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Krayan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.986.950,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Krayan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4.628.250,00	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Krayan	Jumlah Unit peningkatan Sarana dan Prasara Disiplin Pegawai	4 Laporan	4.628.250,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Krayan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43 Laporan	185.087.840,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Krayan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43 Laporan	185.087.840,00	
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pengadaan BMD**		**0,00**		**Kecamatan Krayan**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pengadaan BMD**		**0,00**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Krayan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0,00		Kecamatan Krayan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0,00	

5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang**	**24 Laporan**	**350.482.800,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang**	**24 Laporan**	**350.482.800,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Krayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Krayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Krayan	Jumlah Honorarium tenaga Honor dan ASN Serta Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Umum Perkantoran	12 Laporan	344.482.800,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Krayan	Jumlah Honorarium tenaga Honor dan ASN Serta Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Umum Perkantoran	12 Laporan	344.482.800,00	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD**	**1 Unit**	**28.833.850,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD**	**1 Unit**	**28.833.850,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Krayan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	28.833.850,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Krayan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	28.833.850,00	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Krayan**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien**	**100 Persen**	**41.079.202,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Krayan**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien**	**100 Persen**	**41.079.202,00**	
1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 Persen**	**26.592.112,00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 Persen**	**26.592.112,00**	

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Krayan	Jumlah usulan musrenbang yang dipertimbangkan	1 Laporan	20.761.620,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Krayan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	20.761.620,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Krayan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	5.830.492,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Krayan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	5.830.492,00	
2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah urusan yang dilimpahkan**	**8 Laporan**	**14.487.090,00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah urusan yang dilimpahkan**	**8 Laporan**	**14.487.090,00**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Krayan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Diterbitkan	4 Laporan	8.166.090,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.	Kecamatan Krayan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Laporan	8.166.090,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Krayan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	6.321.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Krayan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	6.321.000,00	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Krayan**	**Persentase tingkat keberdayaan masyarakat**	**100 Persen**	**5.714.896,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Krayan**	**Persentase tingkat keberdayaan masyarakat**	**100 Persen**	**5.714.896,00**	
1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat desa**	**100 Persen**	**5.714.896,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah kelurahan yang diberdayakan**	**100 Persen**	**5.714.896,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Krayan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23 Lembaga Kemasyarakatan	5.714.896,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Krayan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23 Lembaga Kemasyarakatan	5.714.896,00	

IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Krayan**	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan**	**100 Persen**	**10.730.900,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Krayan**	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan**	**100 Persen**	**10.730.900,00**	
1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan**	**4 Laporan**	**10.730.900,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**10.730.900,00**	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Krayan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	6.080.100,00	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Krayan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	6.080.100,00	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Krayan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	4.650.800,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Krayan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	4.650.800,00	
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Krayan**	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**30.479.630,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Krayan**	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**30.479.630,00**	
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Krayan**	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**30.479.630,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Krayan**	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**30.479.630,00**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Kecamatan Krayan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	24 Orang	24.699.600,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Kecamatan Krayan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	24 Orang	24.699.600,00	

	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	Pelaksanaan tugas forum kordinasi pimpinan di kecamatan	Kecamatan Krayan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan	2 Dokumen	5.780.030,00	Pelaksanaan tugas forum kordinasi pimpinan di kecamatan	Kecamatan Krayan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan	2 Dokumen	5.780.030,00	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Krayan**	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional**	**100 Persen**	**34.687.650,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Krayan**	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional**	**100 Persen**	**34.687.650,00**	
1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi**	**12 Dokumen**	**34.687.650,00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Krayan**	**Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi**	**12 Dokumen**	**34.687.650,00**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Krayan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	8.500.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Krayan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	8.500.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Krayan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	4.941.200,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Krayan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	4.941.200,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Krayan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	21.246.450,00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Krayan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Dokumen	21.246.450,00	
					3.433.990.850,00					3.433.990.850,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Kecamatan Krayan pada tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan dan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Krayan.

Telaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Krayan maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut bertujuan supaya dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana berdasarkan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Krayan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Krayan

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Krayan mempunyai tujuan "***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan"*** dengan sasaran "***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Krayan".***

3.3. Program Dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Program OPD Kecamatan Krayan perubahan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman dari hasil evaluasi kegiatan pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :**
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:**
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:**
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :**
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan :**
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:**
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:**
  - Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, meliputi sub kegiatan:**
  - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
  - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi sub kegiatan:**
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi sub kegiatan:**
  - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi sub kegiatan:**
  - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangat Desa
  - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**
  - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
  - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2026 OPD Kecamatan Krayan dapat dilihat pada Tabel T-C 33 berikut.

Tabel T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN NUNUKAN

No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kelancaran pelaksanaan pelayanan umum dengan administrasi yang tertib ditunjang dengan sarana prasarana yang lengkap dan sumber daya yang berkualitas**	**Kecamatan Krayan**	**100 Persen**	**3.311.298.572,00**	**APBD II**		**100 Persen**	**3.311.298.572,00**
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas**	**Kecamatan Krayan**	**100 Persen**	**17.022.800,00**	**APBD II**		**100 Persen**	**17.022.800,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Krayan	12 Dokumen	3.000.800,00	APBD II		12 Dokumen	3.000.800,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Krayan	1 Dokumen	14.022.000,00	APBD II		1 Dokumen	14.022.000,00
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan**	**Kecamatan Krayan**	**23 orang/ bulan**	**2.659.163.634,00**	**APBD II**		**23 orang/ bulan**	**2.659.163.634,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Krayan	23 orang/ bulan	2.659.163.634,00	APBD II		23 orang/ bulan	2.659.163.634,00

3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	**Kecamatan Krayan**	**100 Persen**	**255.795.488,00**	**APBD II**		**100 Persen**	**255.795.488,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Krayan	1 Paket	33.000.000,00	APBD II		1 Paket	33.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Krayan	1 Paket	29.092.448,00	APBD II		1 Paket	29.092.448,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Krayan	2 Paket	3.986.950,00	APBD II		2 Paket	3.986.950,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Krayan	4 Laporan	4.628.250,00	APBD II		4 Laporan	4.628.250,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Krayan	43 Laporan	185.087.840,00	APBD II		43 Laporan	185.087.840,00
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD**	**Kecamatan Krayan**		**0,00**	**APBD II**			**0,00**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kecamatan Krayan		0,00	APBD II			0,00

5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang**	**Kecamatan Krayan**	**24 Laporan**	**350.482.800,00**	**APBD II**		**24 Laporan**	**350.482.800,00**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan internet, rekening air dan listrik	Kecamatan Krayan	12 Laporan	6.000.000,00	APBD II		12 Laporan	6.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium tenaga Honor dan ASN Serta Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Umum Perkantoran	Kecamatan Krayan	12 Laporan	344.482.800,00	APBD II		12 Laporan	344.482.800,00
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD**	Kecamatan Krayan	1 Unit	28.833.850,00	APBD II		1 Unit	28.833.850,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kecamatan Krayan	1 Unit	28.833.850,00	APBD II		1 Unit	28.833.850,00
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien**	**Kecamatan Krayan**	**100 Persen**	**41.079.202,00**	**APBD II**		**100 Persen**	**41.079.202,00**
1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Krayan**	**100 Persen**	**26.592.112,00**	**APBD II**		**100 Persen**	**26.592.112,00**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah usulan musrenbang yang dipertimbangkan	Kecamatan Krayan	1 Laporan	20.761.620,00	APBD II		1 Laporan	20.761.620,00

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Kecamatan Krayan	2 Dokumen	5.830.492,00	APBD II		2 Dokumen	5.830.492,00
2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah urusan yang dilimpahkan**	**Kecamatan Krayan**	**8 Laporan**	**14.487.090,00**	**APBD II**		**8 Laporan**	**14.487.090,00**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Diterbitkan	Kecamatan Krayan	4 Laporan	8.166.090,00	APBD II		4 Laporan	8.166.090,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Krayan	4 Laporan	6.321.000,00	APBD II		4 Laporan	6.321.000,00
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat keberdayaan masyarakat**	**Kecamatan Krayan**	**100 Persen**	**5.714.896,00**	**APBD II**		**100 Persen**	**5.714.896,00**
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat desa**	**Kecamatan Krayan**	**100 Persen**	**5.714.896,00**	**APBD II**		**100 Persen**	**5.714.896,00**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Krayan	23 Lembaga Kemasyarakatan	5.714.896,00	APBD II		23 Lembaga Kemasyarakatan	5.714.896,00

IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan**	**Kecamatan Krayan**	**100 Persen**	**10.730.900,00**	**APBD II**		**100 Persen**	**10.730.900,00**
1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan**	**Kecamatan Krayan**	**4 Laporan**	**10.730.900,00**	**APBD II**		**4 Laporan**	**10.730.900,00**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan hasil dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Krayan	2 Laporan	6.080.100,00	APBD II		2 Laporan	6.080.100,00
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Krayan	2 Laporan	4.650.800,00	APBD II		2 Laporan	4.650.800,00
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kecamatan Krayan**	**100 Persen**	**30.479.630,00**	**APBD II**		**100 Persen**	**30.479.630,00**

1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Krayan**	**100 Persen**	**30.479.630,00**	**APBD II**		**100 Persen**	**30.479.630,00**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionaldalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Krayan	24 Orang	24.699.600,00	APBD II		24 Orang	24.699.600,00
	Pelaksanaan tugas forum kordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan	Kecamatan Krayan	2 Dokumen	5.780.030,00	APBD II		2 Dokumen	5.780.030,00
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional**	**Kecamatan Krayan**	**100 Persen**	**34.687.650,00**	**APBD II**		**100 Persen**	**34.687.650,00**
1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi**	**Kecamatan Krayan**	**12 Dokumen**	**34.687.650,00**	**APBD II**		**12 Dokumen**	**34.687.650,00**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Krayan	4 Dokumen	8.500.000,00	APBD II		4 Dokumen	8.500.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Krayan	4 Dokumen	4.941.200,00	APBD II		4 Dokumen	4.941.200,00
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Verifikasi Desa	Kecamatan Krayan	4 Laporan	21.246.450,00	APBD II		4 Laporan	21.246.450,00
			Total		**3.433.990.850,00**				**3.433.990.850,00**

BAB IV
PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Kecamatan Krayan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan di Kecamatan Krayan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Krayan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Nunukan di Kecamatan Krayan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Krayan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Krayan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Nunukan secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan Renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Untuk itu kami mengharapkan kepada semua pihak yang terlibat untuk sungguh-sungguh melaksanakan Rencana Kerja ini, sehingga dapat tercapai pelayanan yang efektif sekaligus upaya mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan pemerintahan Kecamatan Krayan agar masyarakat yang sehat, cerdas, tentram dan sejahtera dapat tercapai.

Long Katung, 4 Maret 2026
CAMAT KRAYAN

RONNY FIRDAUS, SE.,M.Si
NIP. 197312 312000112 1 012